



Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Nomor	PHK-ELHKPN-102720357
Tanggal	14/04/2022
Nama Lengkap	SUWARDYOYO
NHK	757438
BIDANG	EKSEKUTIF
JABATAN	SEKRETARIS KECAMATAN
LEMBAGA	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SUB_UNIT_KERJA	KECAMATAN JUMANTONO
Jenis Laporan	Periodik - 2021
Tanggal Pelaporan	31 Desember 2021
Tanggal Kirim Final	27 Januari 2022
Tanah dan Bangunan	1.475.000.000
Alat Transportasi dan Mesin	607.000.000
Harta Bergerak Lainnya	40.000.000
Surat Berharga	----
Kas dan Setara Kas	10.000.000
Harta Lainnya	----
Hutang	----
Total Harta Kekayaan	2.132.000.000



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERYCA MURWIDYAWAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
3. NHK : 801373

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 255.000.000

1. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 30.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ---

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 286.000.000

III. HUTANG Rp. 110.000.000

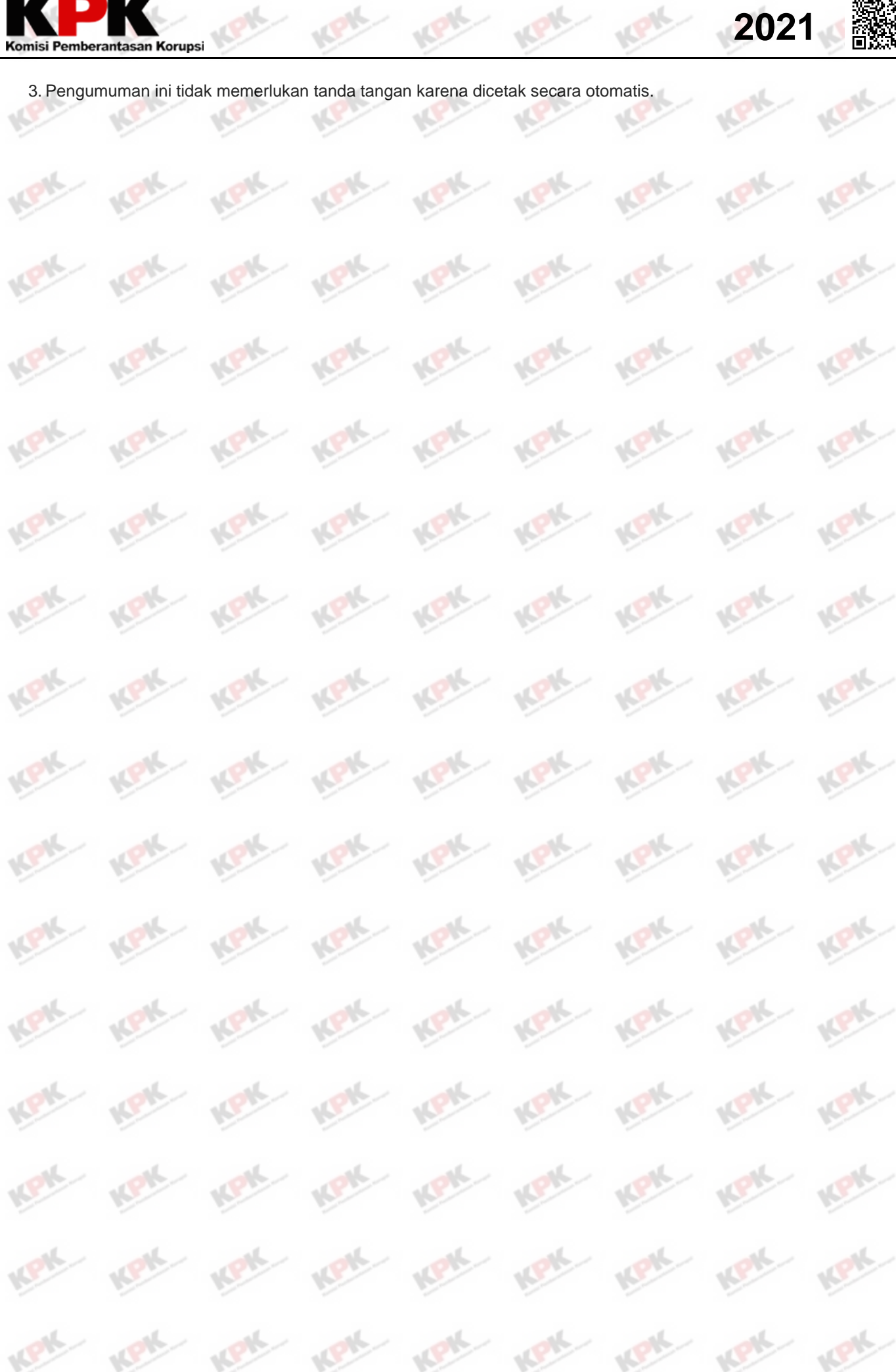
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 176.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARNI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
3. NHK : **829915**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	28.000.000
1. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	---
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	37.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	37.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LASMIATI YULI HARTATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3. NHK : 766023

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 270.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 730 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 99.500.000

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, FORD FIESTA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 76.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ---

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 389.500.000

III. HUTANG Rp. 75.350.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 314.150.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.